

# Komandan Densus 99 Membongkar Cita-Cita Khilafah Islamiyah

written by Harakatuna

**Harakatuna.com.** Jakarta - Komandan Detasemen Khusus (Densus) 99 Barisan Ansor Serbaguna (Banser) H Nuruzzaman menegaskan, anak-anak muda Nahdlatul Ulama di Gerakan Pemuda Ansor tetap akan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ideologi apapun yang akan merubah Indonesia.

“Apapun itu, apapun ideologi itu yang akan merubah NKRI, kami akan hadapi. Kami tidak takut kepada siapapun,” kata Nuruzzaman berapi-ap- saat menjadi salah satu narasumber pada Serial Diskusi nusantaranews.co bertajuk “Membedah Agenda Politik Komunisme dan Khilafah di Pilpres 2019”, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/2018) lalu.

Salah satu ideologi yang pernah dihadapang oleh Ansor, tuturnya, adalah ideologi komunis yang berkembang di Indonesia dengan sebuah partai cukup besar waktu itu ialah Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan, katanya, sudah menjadi konsumsi publik riwayat bagaimana kiprah Ansor menghabisi PKI.

“Bahkan kami dituduh sebagai pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia karena kami menghabisi PKI. Semua tahu, kelompok neo-liberal yang melakukan itu ke kami,” katanya.

PKI bagi GP Ansor merupakan perusak NKRI yang telah dilarang di Indonesia karena hendak merubah NKRI. Karena itu, para pemuda Ansor turut serta dalam upaya menangkal usaha kelompok barhaluan kiri tersebut untuk menguasai sistem negara dengan cara kudeta.

Selain ideologi komunisme yang meluas bersama PKI di zaman dulu, kata Nuruzzaman, kini ada paham khilafah yang diperjuangkan Hizbut Tahrir Indonesia dimana ideoli ini juga ditengarai hendak merubah NKRI pula. Karena itu, GP Ansor mengambil peran penting untuk membendung usaha HTI untuk menguasai kemudian merubah NKRI.

“Soal khilafah, kami harus tegaskan, Hizbut Tahrir Indonesia bukan organisasi dakwah Islamiyah tetapi organisasi politik yang ingin merubah negara ini. Kalau mereka organisasi dakwah Islam, kenapa mereka ditolak di Saudi? Kenapa mereka dilarang di Jordania? Kenapa dilarang di Mesir? Kenapa mereka dilarang di Malaysia? Kenapa dilarang di Bangladesh? Kenapa dilarang di Itu negara-negara Islam,” paparnya.

“Kalau Hizbut Tahrir Indonesia tidak dilarang di Indonesia, harusnya disana, kalau mereka ini organisasi dakwah islam, di Saudi itu tidak dilarang, di Mesir tidak dilarang, di Jordan tidak dilarang. Ini Fakta. Bukan Ilusi. Fakta. Itu yang pertama,” imbuhnya.

Kedua, lanjut Nuruzzaman, kalau Hizbut Tahrir ini memiliki cita-cita merubah menjadi khilafah Islamiyah, masuk konstitusi, jadi partai politik. Perjuangkan secara konstitusi di negara ini, toh ini negara demokrasi, orang memperjuangkan apapun disini. Kenapa mereka tidak mau? Karena mereka menganggap sistem demokrasi yang dianut oleh seluruh pemerintahan di dunia ini: Toghut! Ini sistem syetan. Apa yang harus dilakukan harus mengikuti ajaran Rosulullah.

“Baik kita lihat bagaimana caranya sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq dipilih menjadi kholifah. Beliau dibaiat. Yang pertama melakukan adalah sahabat Umar bin Khattab. (Sahabat Umar) ngangkat pedang dan mengatakan, saya baiat Umar (Abu Bakar, maksudnya), siapa yang tidak ikut berbaiat terhadap Abu Bakar, saya penggal kepalanya. Selanjutnya, bagaimana sahabat Umar diangkat menjadi kholifah, sahabat Abu Bakar menunjuk sahabat Umar bin Khattab untuk menggantikan beliau,” kisahnya.

Sahabat Usman bin Affan itu, lanjutnya, dipilih dengan cara menggunakan tim formatur (bahasa modern). Mekanismenya, dipilih 5 (lima) orang sahabat, salah satunya adalah Abdullah bin Umar putra dari Umar bin Khattab, yang hanya memiliki hak suara tetapi tidak boleh dipilih. Itu kata Umar. Maka Usman bin Affan yang menjadi kholifah.

Ketiga, kata dia, sistem khilafah seperti apa yang mau dibangun oleh Hizbut Tahrir kalau mereka menolak. Ok, mereka bercita-cita seperti umat Islam dulu seperti Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah, Turki Usmani, Fatimiyah, Umayyah Andalusia. Itu kerajaan, anak-anaknya yang diangkat menjadi penggantinya. Bukan sistem khilafah. Mana kemudian yang diinginkan?

## **Metode Perjuangan HTI**

Nuruzzaman menguraikan salah satu metode perjuangan Hizbut Tahrir adalah tiga tahap, itu ada di dalam buku-buku mereka. Pertama adalah melakukan kaderisasi. Mereka sudah melakukan, ada sekitar 1500 orang. Hanya 1500 orang. "Dan saya meyakini mereka tidak akan ikut pemilu, tidak akan mendukung presiden siapapun, baik pak Prabowo atau Jokowi. Karena buat mereka sistem politik hari ini dalam pemilu adalah toghut," katanya.

"Jadi saya tidak percaya kalau jamaah Hisbut Tahrir akan menggunakan hak suaranya untuk Pak Prabowo. Saya tidak percaya itu. Kalau mereka menggunakan hak suaranya, berarti mereka berkhianat terhadap aqidah mereka sendiri. Termasuk mereka tidak akan menggunakan hak suaranya untuk Jokowi," tambahnya.

Tahapan Hizbut Tahrir yang kedua adalah sosialisasi kepada masyarakat. Seperti yang dilakukan kemarin, mereka mengibarkan bendera bertuliskan laa Ilaaha illallah Mumammadarrusulullah dengan warna merah dan hitam. Itu bukan bendera Rosulullah jaman dahulu. Bukan! Semangat beragamanya orang Indonesia itu sangat tinggi.

Tahapan yang ketiga, ada di buku Hizbut Tahrir sendiri, adalah merebut kekuasaan. Salah satu metode merebut kekuasaan Hizbut Tahrir adalah melakukan lobby terhadap orang yang memiliki uang.

"Mari kita bicara fakta saja. Hizbut Tahrir di Jorjania melakukan kudeta 4 (empat) kali tapi gagal. Mereka ikut dengan ikhwanil muslimin melakukan pembunuhan terhadap Presiden. Mohon maaf waktu yang ikut melakukannya ada tentara yang sudah terpapar ke kelompok Ikhwanul Muslimin. Kemudian di Iraq mereka dua kali melakukan kudeta," tegasnya.

Yang berikutnya, lanjut Nuruzzaman, ini yang banyak tidak dipahami oleh orang-orang. Ada faksi radikal yang dimiliki oleh Hizbut Tahrir. Walaupun Ismail Yusanto mengatakan bahwa di adalah bukan anggota Hizbut Tahrir.

"Saya harus menyatakan bahwa dia adalah bagian dari Hizbut Tahrir. Salah satu cabang Hizbut Tahrir adalah Al-Muhajirun, tokohnya adalah Bahrum Naim. Satunya ditangkap karena membawa 16 orang ke Syria, namanya adalah Fahri. Fahri ini adalah alumni Fakultas Ilmu Sosial dan politik Universitas Jember

(Jurusan Hubungan Internasional),” ungkapnya.

Sumber: Nusantaranews